

## Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN  
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA  
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500177524787

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,  
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750  
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : BERKAT ANUGRAH  
Alamat : JL BY PASS NGURAH RAI A/8 NO.77, RT 000, RW 000, BENOA, KUTA SELATAN, KAB. BADUNG, BALI  
80363 #0026024240904000000000  
NPWP : 0026024240904000  
NIK : -  
Nomor Paspor : -  
Identitas Lain : -  
Email: berkatanugerahh123@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	940500	Duro LED KC1 Module TRIAC 9W4000K 36D Rp 107.391,89 x 48,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.154.810,72
2	940500	Duro LED KC1 Module 12W3000K24D Rp 107.675,68 x 96,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	10.336.865,28
3	853900	Motion Sensor LED Bulb 6W 6500K Rp 36.036,00 x 100,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	3.603.600,00
4	940500	Duro LED KC1 Module TRIAC 9W3000K 24D Rp 107.391,89 x 48,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	5.154.810,72
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			24.250.087,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			22.229.246,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			2.667.510,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 18 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik  
MING XIAO

(Referensi: 70CH-250612-0015)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2